

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar belakang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Pada tahun 2019 atau tahun keempat pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pelaksanaan kegiatannya memperhatikan kebijakan umum dan program pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yang telah menetapkan tema pembangunan tahun 2019 adalah Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Serta Ekonomi untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah dan Mengurangi Kemiskinan.

Sejalan dengan amanat RPJMD tersebut, penjabaran isu isu strategis secara fokus telah tertuang dalam Renstra DPUPR dengan arah kebijakan pembangunan infrastruktur prioritas sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, drainase dan irigasi)
2. Memperbesar aksesibilitas wilayah
3. Manajemen lingkungan dan mempercepat cakupan dan kualitas sanitasi di kawasan pemukiman
4. Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
5. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan ruang bagi kawasan pemukiman

Selain itu, pada tahun 2019 dikembangkan arah kebijakan dalam rangka pelaksanaan misi pembangunan sebagai amanat RPJMD sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran tentang Wonosobo sebagai Kabupaten Ramah HAM
2. Membangun ketatalaksanaan yang efektif dan efisien
3. Penataan Administrasi Pertanahan terhadap lahan-lahan aset negara sebagai salah satu sumber daya pembangunan

4. Menerapkan kebijakan tata ruang secara berkelanjutan, partisipatif dan berkeadilan.

I.2. Internal Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Faktor internal yang mempengaruhi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan anggaran

Sebagai dinas teknis yang out put utamanya adalah infrastruktur maka kemampuan anggaran yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten merupakan salah satu faktor terpenting dalam pencapaian kinerja. Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengelola anggaran langsung sebesar Rp 228.773.344.312 (Dua ratus Dua Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tigaratus Dua Belas Rupiah). Hal ini tentunya sangat mempengaruhi capaian kinerja DPUPR di tahun 2019 dan juga dapat berimplikasi pada capaian secara total dari Rencana Strategis DPUPR Tahun 2019-2021.

2. Kondisi Sumber Daya Manusia

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan sangat dipengaruhi oleh kondisi internal diantaranya adalah peta SDM dan struktur organisasi yang ada. Data kepegawaian tahun 2019 terkait jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo

a. Pegawai berdasarkan Distribusi Pada Unit-Unit Kerja

Tabel 1.1 Pegawai Berdasarkan Distribusi Pada Unit-Unit Kerja *)

Unit Kerja	JPT Pertama (Es.2B)	Administratur (Es.3A)	Administratur (Es. 3B)	Pengawas (Es.4A)	Pejabat Fungsional Ahli	Pejabat Fungsional Terampil	Staf PNS	Σ
Kepala Dinas	1							1
Sekretariat		1		1	-	-	23	25

Bidang Bina Program			1	2	2	-	2	7
Bidang Bina Marga			1	2	2	-	5	10
Bidang Sumber Daya Air			1	-	2	-	7	10
Bidang Penataan Ruang			1	1	-	-	3	5
Bidang Cipta Karya			1	2	-	-	5	8
UPTD Pengelolaan Alat Berat				1	-	-	2	3
UPTDLaboratorium Teknis				1	-	-	-	1
UPTD Wilayah Wonosobo				1	-	-	7	8
UPTD Wilayah Garung				1	-	-	5	6
UPTD Wilayah Sukoharjo				1	-	-	7	8
UPTD Wilayah Sapuran				1	-	-	6	7
UPTD Wilayah Kaliwiro				1	-	-	2	3
JUMLAH	1	1	5	15	6	0	74	102

*) Data Kepegawaian per Desember 2019

b. Pegawai PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.2 Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan *)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai	%
1	Sarjana strata 2 (S2)	10	9,8
2	Sarjana strata 1 (S1)	19	18,6
3	Sarjana muda/diploma	3	2,9
4	SMA/SMK	40	39,2

5	SLTP	18	17,6
6	SD/MI	12	11,8
JUMLAH		102	100

*) Data Kepegawaian per Desember 2019

c. Pegawai PNS Berdasarkan Eselon

Tabel 1.3 Pegawai Berdasarkan Eselon *)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai	%
1	Eselon 2B	1	1,0
2	Eselon 3A	1	1,0
3	Eselon 3B	5	4,9
4	Eselon 4A	14	13,7
5	Non Eselon	81	79,4
JUMLAH		102	100

*) Data Kepegawaian per Desember 2019

d. Pegawai PNS Berdasarkan Golongan

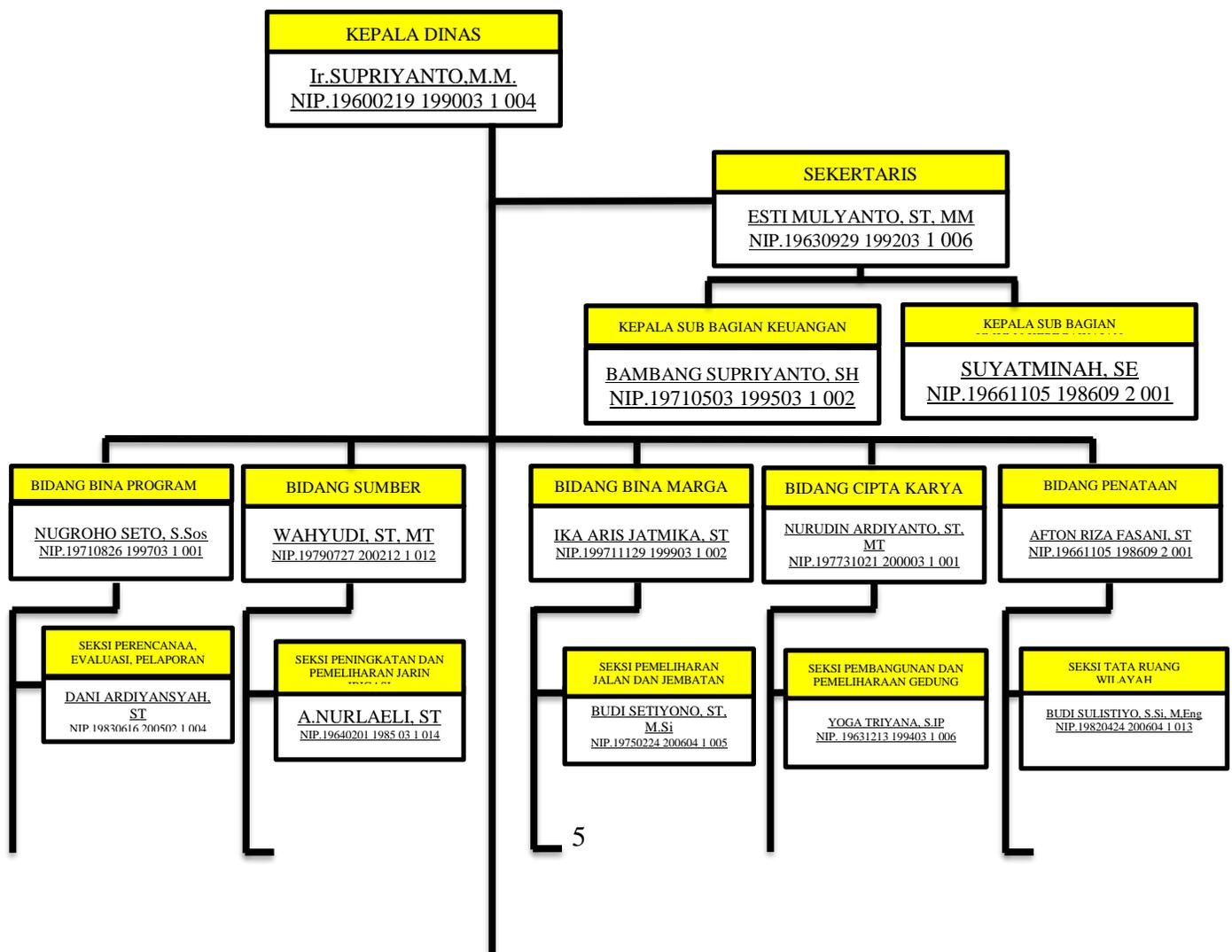
No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai	%
1	Pembina Utama Muda / Ivc	1	0,99
2	Pembina Tingkat 1 / Ivb	-	-
3	Pembina / Iva	6	5,94
4	Penata Tk. 1 / IIIb	11	10,89
5	Penata / IIIc	6	5,94
6	Penata Muda Tk. 1 / IIIb	13	12,87
7	Penata Muda / IIIa	4	3,96

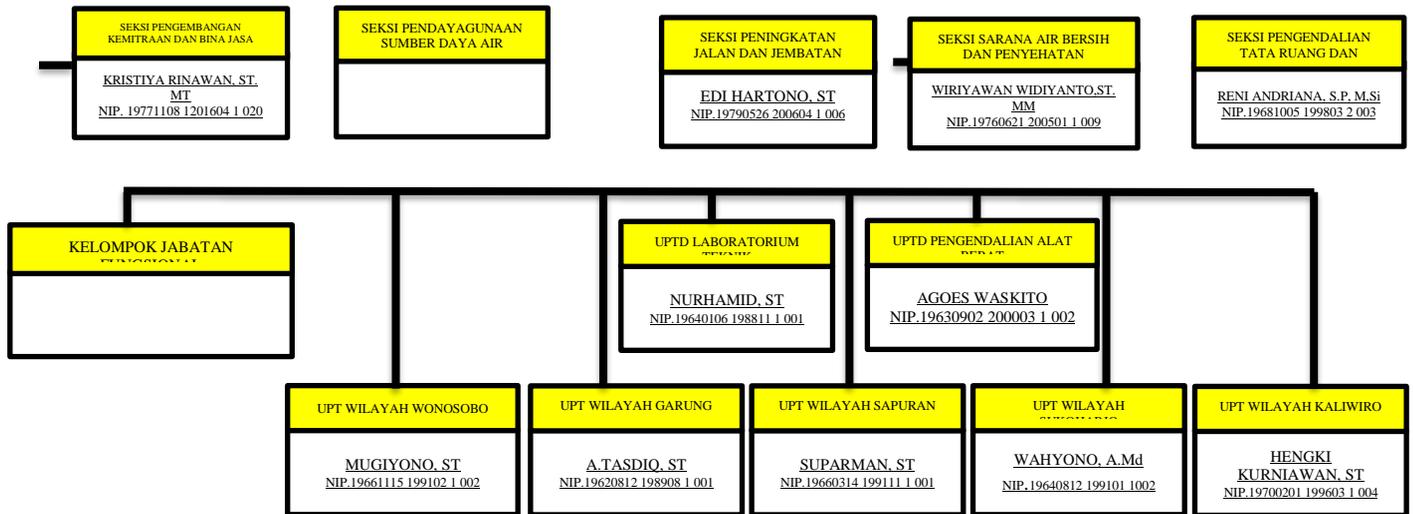
8	Pengatur / Tk. 1 / IIb	11	10,89
9	Pengatur / Iic	18	17,82
10	Pengatur Muda Tk. 1 / IIb	1	0,99
11	Pengatur Muda / IIa	13	12,87
12	Juru Tk. 1 / Id	1	0,99
13	Juru / Ic	16	15,84
14	Juru Muda Tk. 1 /Ib	-	-
JUMLAH		102	100

*) Data Kepegawaian per Desember 2019

Bagan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang beserta isian pejabatnya dapat dilihat sebagaimana Gambar 1.1 sebagai berikut :

Gambar 1.1 Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo





Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo, 2019

1.3. Strategic Issued

Permasalahan utama yang di hadapi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Wonosobo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan Dukungan SDM

Dari data pegawai yang sudah disampaikan di atas, tampak bahwa dukungan sumber daya manusia di Dinas PUPR baik secara kuantitas maupun kualitas masih kurang. Jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan lanjut berupa diploma dan sarjana tidak lebih dari 33%. Prosentase tenaga teknis dibandingkan non teknis PNS di lingkungan DPUPR adalah 54%.

2. Kewenangan Yang Sangat Besar

Kewenangan yang di miliki dinas PUPR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sangat besar. Untuk bidang jalan, sesuai surat Keputusan Bupati Wonosobo Nomor : 620/300/2016 Tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai jalan Kabupaten diatur mengenai jumlah ruas dan panjang jalan yang menjadi kewenangan yaitu 276 ruas dengan panjang 999,276 kilometer. Untuk irigasi Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

Nomor 14/KPTS/M/2015 tahun 2015 menyatakan bahwa di Kabupaten Wonosobo, daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten adalah sebanyak 705 Derah Irigasi (DI) dengan luas 21.050 Hektar.

Terkait target pemenuhan SPM Urusan Pekerjaan Umum, terdapat 2 SPM yang kesemuanya sangat sulit untuk dicapai jika melihat tren penanganan dan penganggaran saat ini. SPM tersebut adalah

a. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari

Sebagai salah satu layanan dasar, sampai dengan tahun 2019 capaian SPM ini adalah sebesar 94,62%

b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik

Sebagai salah satu layanan dasar, sampai dengan tahun 2019 capaian SPM ini adalah sebesar 59,96%

Besarnya angka rencana capaian yang tidak sebanding dengan tren kemampuan pembiayaan daerah untuk sektor ini menjadi masalah mendasar sulitnya upaya pemenuhan SPM dalam jangka dekat.

3. Anggaran Yang Sangat Terbatas

Besarnya kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki seharusnya diimbangi dengan alokasi anggaran infrastruktur yang dikelola. Namun demikian, karena anggaran yang sangat terbatas maka alokasi yang diterima oleh DPUPR masih belum Mampu menyelesaikan permasalahan infrastruktur yang disandang.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Rencana kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana disampaikan diatas sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran dalam APBD Tahun 2019. Pada Tahun 2019, DPUPR melaksanakan 14 program yang diharapkan dapat melaksanakan 6 sasaran strategis sebagaimana amanat RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021.

Adapun sasaran strategin dan indikator kinerja sebagai berikut :

Table 2.1 Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas layanan jalan dan jembatan	Tingkat kemantapan jalan	68%
2	Meningkatnya cakupan layanan irigasi	Presentase jaringan irigasi kabupaten kondisi baik	71,06%
3	Meningkatnya cakupan layanan air minum	Presentase penduduk mendapatkan akses air minum layak	95,11%
4	Meningkatnya cakupan layanan akses sanitasi dasar	Presentase penduduk mendapatkan akses sanitasi	74,20%
5	meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW)	83,15%
6	Meningkatnya kualitas sistem penopang dan layanan kedinasan	Indeks kepuasan masyarakat	76
		Nilai evaluasi SAKIP dinas PUPR	BB

Untuk mewujudkan target kinerja yang sudah di tetapkan tersebut, Dinas PUPR sebagaimana tertuang Perjanjian Kerja (PK) Tahun 2019 mendapatkan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 114.183.082.000 (Seratus Empat Belas Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) untuk melaksanakan 14 program. Rincian anggaran preprogram dapat dilihat dalam table berikut :

**Tabel 2.2. Program Dan Anggaran Belanja Langsung Di Dinas PUPR
Sebagaimana Tertuang Dalam APBD Kab. Wonosobo TA 2019**

NO	PROGRAM	ANGGARAN PENETAPAN 2019
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 2.030.500.000
2	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	Rp 20.392.000.000
3	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rp 42.856.364.000
4	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	Rp 2.450.000.000
5	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp 750.000.000
6	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Rp 400.000.000
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Rp 727.000.000
8	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Rp 10.188.737.000
9	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Rp 27.171.481.000
10	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Rp 2.742.000.000
11	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Infrastruktur	Rp 2.375.000.000
12	Program Perencanaan Tata Ruang	Rp 1.800.000.000
13	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rp 200.000.000
14	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Rp 100.000.000
JUMLAH		Rp 114.183.082.000

Didalam Perjanjian Kinerja (KP) Perubahan Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Perubahan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2019, alokasi anggaran belanja langsung untuk pelaksanaan urusan pekerjaan umum di Dinas PUPR Kabupaten Wonosobo bertambah menjadi Rp 221.273.156.000 (Duaratus Dua Puluh Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah). Ada 12 program yang mengalami perubahan (bertambah / berkurang) alokasi anggaran. Rincian program dan alokasi anggaran per program sebagaimana tertuang dalam PK Perubahan 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.3. Program Dan Anggaran Belanja Langsung Di Dinas PUPR Yang Mengalami Perubahan (Bertambah / Berkurang)

NO	PROGRAM	PERUBAHAN ANGGARAN
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 2.945.750.000
2	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	Rp 19.082.000.000
3	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rp 115.062.864.000
4	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	Rp 3.122.000.000
5	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp 8.448.824.000
6	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Rp 382.500.000
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Rp 2.127.000.000
8	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Rp 17.793.737.000
9	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Rp 34.131.481.000
10	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Rp 12.292.000.000
11	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Infrastruktur	Rp 2.035.000.000
12	Program Perencanaan Tata Ruang	Rp 1.800.000.000
13	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rp 200.000.000
14	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Rp 1.850.000.000
JUMLAH		Rp 221.273.156.000

BAB III

AKUNTABILITAS KERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

capaian kinerja organisasi diukur melalui hasil pengukuran kinerja organisasi pada setiap pernyataan kinerja sasaran strategis yang sudah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja pada setiap sasaran strategis yang diamanatkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas layanan jalan dan jembatan

Didalam sasaran strategis ini terdapat empat indikator kerja yaitu :

a. Tingkat Kemantapan jalan

Pada indikator ini, target kinerja yang harus dicapai sampai akhir tahun 2019 adalah 68%, dan capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebesar 64,88% hal ini menunjukkan bahwa indikator kinerja tersebutnya terrealisasi 95,41%

Apabila dikaitkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan tahun 2019 berada dibawah target jangka menengah yaitu sebesar 72%. Hal ini menunjukkan perlu adanya upaya akselerasi pada tahun berikutnya sehingga target akhir tahun perencanaan 2021 sebesar 82% dapat tercapai.

b. Presentase Jaringan Irigasi Kabupaten Kondisi Baik

Pada indikator ini, target kinerja yang harus dicapai sampai akhir tahun 2019 adalah 71,06%, dan capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebesar 68,08% hal ini menunjukkan bahwa indikator kinerja tersebutnya terrealisasi 95,81%.

Apabila dikaitkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan tahun 2019, maka upaya penyediaan irigasi dalam kondisi baik melalui kegiatan peningkatan, rehabilitasi maupun pemeliharaan saluran irigasi perlu di akselerasi. Hal ini mengingat capaian kinerja tahun 2019 masih dibawah target kinerja

perencanaan jangka menengah tahun 2019 yaitu 71% dari tahun 2021 sebesar 75%.

c. Presentase penduduk mendapatkan akses air minum layak

Pada indikator ini, target kinerja yang harus dicapai sampai akhir tahun 2019 adalah 95,11%, dan capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebesar 94,63% hal ini menunjukkan bahwa indikator kinerja tersebut terrealisasi 99,50%.

Apabila dikaitkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan tahun 2019 belum mencapai jangka menengah yaitu sebesar 96% Namun demikian perlu adanya upaya akselerasi pada tahun berikutnya sehingga target akhir tahun perencanaan 2021 sebesar 100% bisa tercapai.

d. Presentase penduduk mendapatkan akses sanitasi

Pada indikator ini, target kinerja yang harus dicapai sampai akhir tahun 2019 adalah 74,20%, dan capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebesar 59,96% hal ini menunjukkan bahwa indikator kinerja tersebut terrealisasi 80,81%.

Apabila dikaitkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan tahun 2019 belum melampaui target jangka menengah yaitu sebesar 80%. Namun demikian perlu adanya upaya akselerasi pada tahun berikutnya sehingga target akhir tahun perencanaan 2021 sebesar 100% bisa tercapai.

e. Nilai Evaluasi SAKIP DPUPR

Pada indikator ini, target kinerja yang harus dicapai sampai akhir tahun 2017 adalah 60,02% dan capaian kinerja pada tahun 2018 adalah sebesar 67,57% hal ini menunjukkan adanya peningkatan capaian penilaian SAKIP DPUPR meskipun peningkatan nilai SAKIP tersebut belum mampu meningkatkan nilai kategori dari B menjadi BB.

Capaian penilaian SAKIP ini masih lebih rendah dari capaian nilai rata rata kabupaten sebesar 69,14% untuk itu perlu peningkatan kapasitas penilaian SAKIP ditahun yang akan datang.

Tabel 3.1. Rincian realisasi kegiatan

NO.	Indikator Kinerja	Target	Capaian kinerja 2018	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tingkat kemantapan jalan	68%	64,88%	95,41%
2	Presentase jaringan irigasi kabupaten kondisi baik	71,06%	68,08%	95,81%
3	Presentase penduduk mendapatkan akses air minum layak	95,11%	94,63%	99,50%
4	Presentase penduduk mendapatkan akses sanitasi	74,20%	59,96%	80,81%
5	Ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW)	83,15%	-	-
6	Indeks kepuasan masyarakat	76	-	-
	Nilai evaluasi SAKIP dinas PUPR	BB	B	-

Sedangkan realisasi masing masing kegiatan dalam program dapat disajikan pada Tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2 Realisasi Anggaran per Kegiatan dalam Program

NO	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.945.750.000	2.752.743.832	93,45%
2	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	19.082.000.000	18.098.194.314	94,84%
3	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	115.062.864.000	107.085.221.873	93,07%
4	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	3.122.000.000	2.719.441.378	87,11%
5	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	13.200.000.000	11.945.314.890	90,49%
6	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	382.500.000	207.464.863	54,24%
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebnamargaan	2.127.000.000	2.000.880.064	94,07%

8	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	17.793.737.000	16.453.837.424	92,47%
9	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	34.131.481.000	33.294.692.644	97,55%
10	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	12.292.000.000	12.190.861.865	99,18%
11	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Infrastruktur	2.035.000.000	1.541.972.822	75,77%
12	Program Perencanaan Tata Ruang	1.800.000.000	1.228.711.500	68,26%
13	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	200.000.000	-	0,00%
14	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	1.850.000.000	696.654.000	37,66%
JUMLAH		226.024.332.000	210.215.991.469	93,01%

Catatan : realisasi keuangan adalah data *unaudited*

Secara angka realisasi anggaran belanja langsung di Dinas PUPR tidak banyak berkembang dari realisasi tahun 2018 yaitu di angka 93,01% atau naik 0,98%. Namun dari segi pelaksanaan kegiatan terdapat 48 (empat puluh delapan) kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena double anggaran dan kegiatan bukan pada kewenangan kabupaten.

Sebagaimana sajian tabel diatas, beberapa program memiliki capaian realisasi keuangan di bawah 75% yaitu :

1. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, pada tahun 2019 ini adalah satu satunya program dengan realisasi anggaran sebesar 0%. Kegiatan dari program ini adalah koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota dimana sasarannya adalah penyusunan dokumen legalitas dokumen rancangan RTRW Kabupaten Wonosobo. Namun hal ini tidak dapat tersealisasi mengingat keterbatasan sumber daya pengelola program ini terutama ditinjau dari kemampuan SDM dari segi latar pendidikan pengelola program/kegiatan.
2. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, merupakan program dengan realisasi anggaran terendah kedua yaitu 37,66%. Rendahnya capaian anggaran ini adalah karena perubahan rencana realisasi belanja pembelian tanah relokasi jalan.
3. Program Perencanaan Tata Ruang, dengan realisasi anggaran sebesar 68,26%. Hal ini berasal dari sisa tender yang cukup besar dan adanya kegiatan fasilitasi BKPRD yang belum dapat berjalan dengan maksimal.
4. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan, dengan realisasi anggaran sebesar 54,24% yang disebabkan karena hanya tercapai 1 kali survey inspeksi kondisi jalan yang baru terlaksana pada 3 bulan terakhir dan adanya rencana pembelian alat survey yang gagal karena ketersediaan waktu. Kegiatan ini sendiri mengalami penundaan pelaksanaan karena DPA dalam penetapan anggaran masih berbentuk belanja modal sehingga harus disesuaikan terlebih dahulu kedalam rekening rekening barang jasa.

BAB IV

PENUTUP

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo sepanjang tahun 2019 disandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 terlihat cukup optimal dan maksima, hal ini tercermin dari realisasi anggaran sebesar 93,01%. Hal ini menunjukkan bahwa dinas telah mampu memanfaatkan dukungan anggaran yang tersedia dengan maksimal. Kegiatan yang tidak terealisasi didominasi pada prinsip ketaatan terhadap aturan pelaksanaan kegiatan yaitu terkait dengan kewenangan dan duplikasi anggaran yang rawan pelanggaran terhadap aturan pengadaan barang jasa.

Namun demikian beberapa catatan yang dapat dijadikan bekal bagi perbaikan kinerja kedepan antara lain :

1. Melanjutkan upaya memperkuat peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah
UPT Wilayah saat ini terus didorong untuk pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang menunjang tugas khususnya pemeliharaan jalan dan irigasi. Tahapan selanjutnya adalah perlunya peningkatan kelembagaan berupa peningkatan kapasitas dan kuantitas SDM sebagai salah satu pilar keberhasilan organisasi.

2. Mendorong strategi baru dalam upaya akselerasi pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum disadari saat ini masih jauh dari yang diharapkan. Untuk itu strategi inovatif perlu untuk dikembangkan dengan sinergi dengan stakeholder potensial.

3. Mendorong upaya peningkatan kesepahaman terkait aturan – aturan pelaksanaan kegiatan

Salah satu permasalahan yang berhubungan dengan tingkat realisasi anggaran adalah masih terdapat banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan. Beberapa alasan yang jamak dijumpai adalah kegiatan diluar kewenangan dan duplikasi anggaran. Untuk itu perlu duduk bersama eksekutif dan legislatif dalam forum yang mengkomunikasikan aturan aturan yang melingkupi proses pelaksanaan kegiatan yaitu aturan pengadaan barang/jasa, kewenangan kabupaten, aturan penanganan air minum, aturan tentang hibah,

status jalan kabupaten dan status daerah irigasi kewenangan kabupaten. Pemahaman awal khususnya pada tahapan perencanaan akan mengurangi resiko duplikasi anggaran dan kegiatan kegiatan yang bukan kewenangan kabupaten.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LkjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 ini disusun. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN WONOSOBO

Ir. WIDI PURWANTO, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19620717 199102 1 001